



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat Kode Pos 98314 Telp./Fax. (0986) 211557

NOTA TUGAS

No: 291/ UN 42.7/ KP/ 2019

Sebagai kelanjutan dari Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat dan Fakultas Ekonomi Unipa dalam rangka Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Papua Barat, maka dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipa menugaskan kepada:

1. Mus Mualim, SE., M.E. sebagai Koordinator
2. Lince Idorway, SH., MM. sebagai Anggota
3. Angelina Ayu Y. Sgiarti, SE sebagai Anggota
4. Oni Dowansiba, S.IP sebagai Anggota
5. Liliyani Margaretha Orisu, SE., M.Sc. sebagai Anggota
6. Nurwidiyanto, SE., M.Si sebagai Anggota
7. Elly Fredrik Karubaba, SE sebagai Anggota
8. Yuyun Puji Rahayu, SP. MDev.Econ sebagai Anggota
9. Naftali Mansim, SE., M.Sc sebagai Anggota

Untuk terlibat dalam tim kajian dimaksud mulai tanggal 27 September 2019 hingga selesai. Demikian Nota Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Manokwari, 27 September 2019

Dekan


DR. RULLY N. WURARAH
NIP. 19640404 199003 1 005



SEMINAR HASIL

KAJIAN KEBIJAKAN

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

PROVINSI PAPUA BARAT

Kerjasama

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat
dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua**



Tim Peneliti

1. Mus Mualim, SE., M.E.
2. Lince Idorway, SH., MM.
3. Angelina Ayu Y. Sgiarti, SE
4. Oni Dowansiba, S.IP
5. Liliyani Margaretha Orisu, SE., M.Sc.
6. Nurwidiyanto, SE., M.Si
7. Elly Fredrik Karubaba, SE
8. Yuyun Puji Rahayu, SP. MDev.Econ
9. Naftali Mansim, SE., M.Sc



Tenaga Pendamping Profesional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, menjadi instrumen penting dalam pengelolaan dana desa.

Latar Belakang

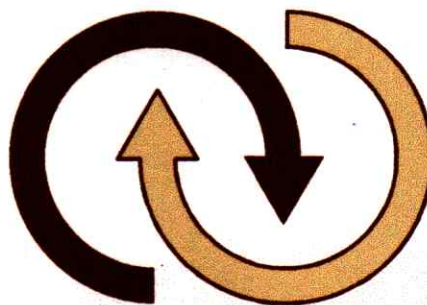


Keberadaan tenaga pendamping profesional diantaranya tenaga pendamping lokal Desa (PLD) yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Latar Belakang

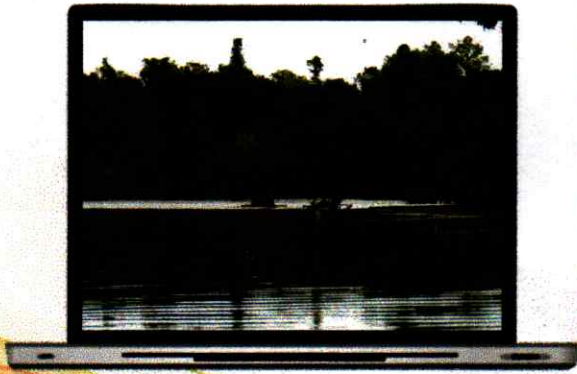
Sejak tahun 2015, keberadaan tenaga pendamping profesional berperan penting dalam mengawal program pembangunan desa yang dibiayai dengan dana desa.

Khusus di Provinsi Papua Barat, keberadaan tenaga pendamping profesional di semua level (kampung, distrik, kabupaten) menjadi tulang punggung suksesnya pelaksanaan pembangunan kampung yang didanai oleh dana desa.



Peran para pendamping profesional ini menjadi penting karena persoalan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung di Papua Barat yang mayoritas masih butuh pendampingan. Artinya, para aparatur kampung masih sangat bergantung pada keberadaan tenaga pendamping untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah tepat sejak perencanaan hingga pelaporannya.

Latar Belakang



Peran penting para pendamping profesional tersebut sayangnya belum bisa maksimal dilaksanakan karena persoalan keterbatasan sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kualitas. Masih banyak tenaga pendamping khususnya di level PLD yang harus mendampingi lebih dari 2 kampung dengan aksesibilitas yang sangat minim dan ekstrim. Di level PD dan TA kondisinya juga tidak jauh berbeda terkait kendala keterbatasan sumber daya, sehingga dirasakan sangat mendesak untuk segera dilakukan pemetaan dan kajian yang komprehensif terkait keberadaan para pendamping ini.

Latar Belakang

Paparan di atas menjadi dasar pemikiran untuk segera dilakukan kajian dengan lokus analisisnya pada empat komponen yakni:



Jumlah tenaga pendamping profesional



Penyebaran tenaga pendamping profesional



Kualifikasi tenaga pendamping profesional



Honorarium tenaga pendamping profesional

Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi tenaga pendamping profesional di Provinsi Papua Barat dengan aspek utama kajian adalah jumlah, sebaran, kualifikasi dan besaran honorarium dari tenaga pendamping profesional.

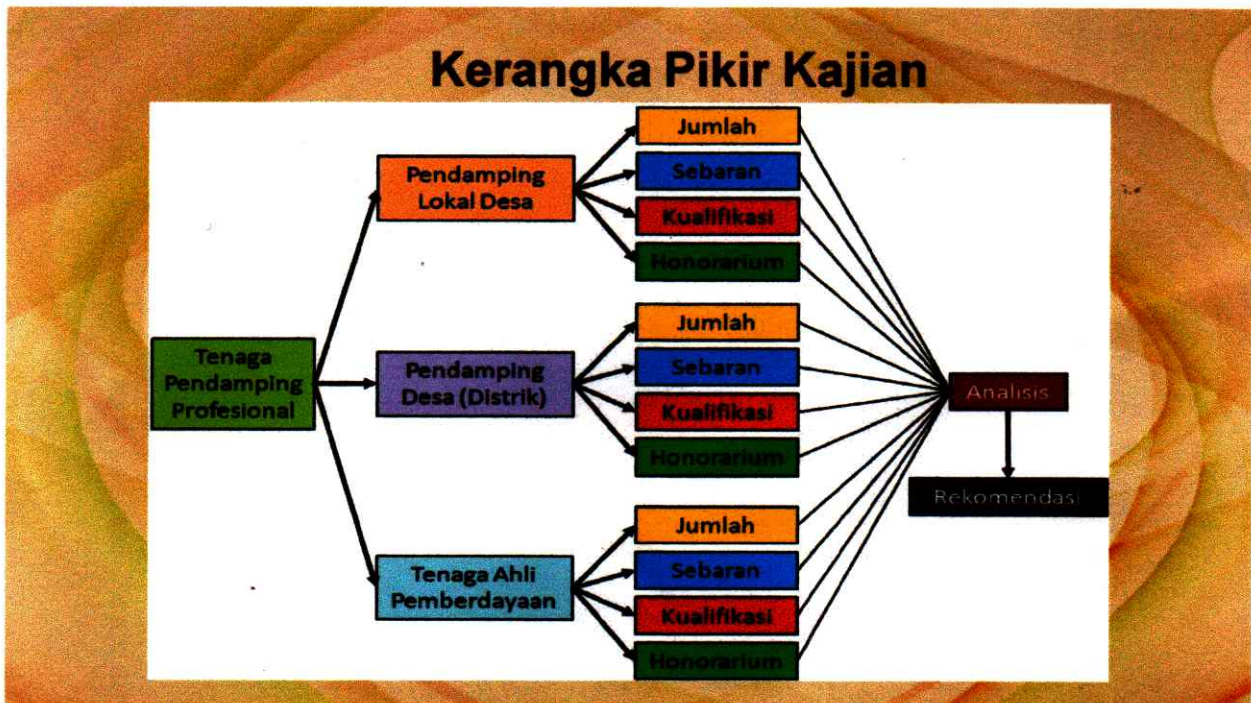
Metodologi

Lokasi kegiatan kajian ini adalah di Provinsi Papua Barat, terdiri dari 12 kabupaten yang terdapat tenaga pendamping profesionalnya. Oleh karenanya lokasi kajian (khususnya pengumpulan data) adalah di 12 kabupaten tersebut.

Data dikumpulkan dari 2 (dua) sumber utama yakni Satker P3MD Provinsi Papua Barat, sebaran, kualifikasi dan honor tenaga pendamping profesional. Selanjutnya sumber kedua adalah tenaga pendamping profesional yang menjadi responden.

Responden dalam kajian ini ditentukan dengan pendekatan *stratified random sampling* dimana teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan (*strata*) pada elemen populasi.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan tabulasi. Metode deskriptif adalah untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat.





Luas wilayah Provinsi Papua Barat yang mencapai 102.955,15 km² habis terbagi menjadi 13 Kabupaten/ Kota, tepatnya 12 Kabupaten dan 1 Kota. Sampai akhir 2018, Provinsi Papua Barat terbagi menjadi 12 kabupaten dan 1 kota.

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Papua Barat atau mencapai 20,24% dari total wilayah Papua Barat. Sementara Kota Sorong memiliki wilayah paling kecil di Papua Barat dengan prosentase 0,64% dari total wilayah Papua Barat (BPS Papua Barat, 2019).

Bentang alam Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori lengkap karena memiliki hampir seluruh jenis bentang alam. Daerah pegunungan mendominasi wilayah tengah Papua Barat yang meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak, Tamberau dan sebagian Manokwari Selatan. Sebagian Kabupaten Fakfak dan Kaimana juga memiliki bentang alam pegunungan. Bentang alam dataran rendah dapat ditemukan di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Sorong, sebagian Tamberau, Maybrat serta Sorong Selatan. Daerah pasang surut dan rawa-rawa mendominasi wilayah selatan Papua Barat meliputi Kabupaten Teluk Bintuni, Fak-fak, Kaimana dan sebagian daerah Sorong Selatan. Adapun daerah kepulauan dan pesisir meliputi seluruh daerah Kabupaten Raja Ampat, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak dan sebagian Sorong Selatan.

Sejak tahun 2015, nyaris tidak ada penambahan atau pemekaran distrik di Provinsi Papua Barat. Hanya di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 terjadi penambahan jumlah distrik dari 9 distrik menjadi 17 distrik. Kemudian pada tahun 2017, di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tamberau terjadi penambahan atau pemekaran distrik sehingga jumlahnya bertambah menjadi 30 dari sebelumnya 19 distrik di Kabupaten Sorong dan 28 dari sebelumnya 11 distrik di Kabupaten Tamberau. Kemudian terjadi penambahan lagi 1 distrik di Kabupaten Tamberau pada tahun 2018.

Sebaran Distrik pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
1	Fakfak	9	17	17	17
2	Kaimana	7	7	7	7
3	Teluk Wondama	13	13	13	13
4	Teluk Bintuni	24	24	24	24
5	Manokwari	9	9	9	9
6	Sorong Selatan	15	15	15	15
7	Sorong	19	19	30	30
8	Raja Ampat	24	24	24	24
9	Tamberau	11	11	28	29
10	Maybrat	24	24	24	24
11	Manokwari Selatan	6	6	6	6
12	Pegunungan Arfak	10	10	10	10
13	Kota Sorong	10	10	10	10
Jumlah		181	189	217	218

Pemekaran distrik sejatinya merupakan kelanjutan dari pemekaran kampung/desa yang merata terjadi di Papua Barat. Sampai tahun 2014, tercatat 1.590 kampung dan kelurahan di Provinsi Papua Barat. Jumlah ini mengalami penambahan signifikan hingga menjadi 1.878 kampung dan kelurahan pada tahun 2018.

Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Fakfak	125	136	136	144	149
2	Kaimana	86	86	86	86	86
3	Teluk Wondama	76	76	76	76	76
4	Teluk Bintuni	260	262	262	262	262
5	Manokwari	173	173	173	173	173
6	Sorong Selatan	123	123	123	123	123
7	Sorong	142	143	143	225	253
8	Raja Ampat	121	121	121	121	121
9	Tambrau	78	78	78	199	219
10	Maybrat	152	152	152	152	152
11	Manokwari Selatan	57	57	57	57	57
12	Pegunungan Arfak	166	166	166	166	166
13	Kota Sorong	31	41	41	41	41
Jumlah		1.590	1.614	1.614	1.825	1.878

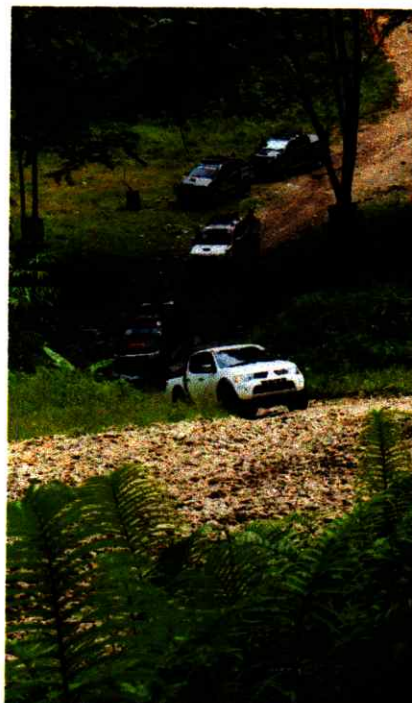
Demografi

Jumlah

Jumlah penduduk Papua Barat dari hasil proyeksi yaitu sebesar 937.458 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri atas 481.939 penduduk laki-laki dan 433.422 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pertahun pada 2010-2018 adalah sebesar 2,57. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebesar 111,09. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.

Kepadatan

Kepadatan penduduk di Papua Barat tahun 2018 mencapai 9,11 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Sorong sebesar 376,29 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Tambrau yaitu sebesar 1,20 jiwa/km². Kota Sorong mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 247.084 jiwa, diikuti Kabupaten Manokwari 170.897 jiwa dan Kabupaten Sorong 86.994 jiwa.



Aksesibilitas Wilayah

Dengan wilayah yang cukup luas, kondisi jalan yang sangat terbatas, menjadikan aksesibilitas wilayah di Papua Barat sebagai masalah klasik. Meski dua kota utama di Papua Barat yakni Manokwari dan Sorong telah terhubung oleh jalan darat, namun kondisi jalan yang belum beraspal dan medan yang cukup berat, menjadikan transportasi udara dan laut masih menjadi pilihan utama pergerakan orang dan barang antar kedua kota tersebut. Adapun kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan pesisir pantai seperti Teluk Wondama, Raja Ampat, Kaimana dan Fakfak, masih sangat tergantung pada transportasi laut sebagai moda transportasi utama masyarakat.

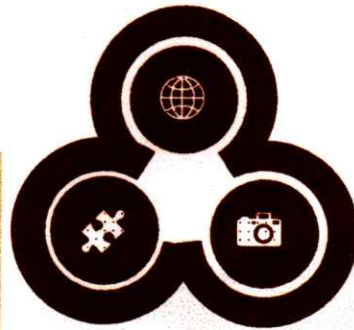


HASIL & PEMBAHASAN

Jumlah Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Papua Barat
Berdasarkan Bidang Kerja, Tahun 2019

No	Bidang Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Pendamping Lokal Desa (PLD)	460	53,87
2	Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	237	27,75
3	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	89	10,42
4	Tenaga Ahli (TA)	68	7,96
Total		854	100

... yang berarti bahwa di Papua Barat terdapat 1.878 kampung yang terdampangi oleh 460 orang PLD, maka jumlah Pendamping Lokal Desa (PLD) di Papua Barat sangat timpang dengan jumlah kampung yang ada. Dengan jumlah kampung mencapai 1.878 (BPS Papua Barat, 2019) hanya didampangi oleh 460 orang PLD, maka dapat dipastikan bahwa akan ada kampung yang tidak terdampangi atau setidaknya kurang terdampangi karena beberapa kampung hanya ditangani oleh seorang PLD.



Bila mengacu pada data jumlah kampung, maka jumlah Pendamping Lokal Desa (PLD) di Papua Barat sangat timpang dengan jumlah kampung yang ada. Dengan jumlah kampung mencapai 1.878 (BPS Papua Barat, 2019) hanya didampangi oleh 460 orang PLD, maka dapat dipastikan bahwa akan ada kampung yang tidak terdampangi atau setidaknya kurang terdampangi karena beberapa kampung hanya ditangani oleh seorang PLD.

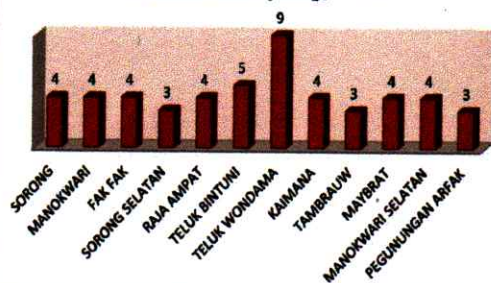
Sementara untuk tenaga PD-P, jumlahnya justru melebihi jumlah distrik/kecamatan di Papua Barat. Dengan jumlah distrik sebanyak 218 distrik (BPS Papua Barat, 2019), didampangi oleh 237 orang PD-P yang berarti ada distrik yang didampangi sekaligus oleh lebih dari seorang PD-P.

Sebaran Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten, Tahun 2019



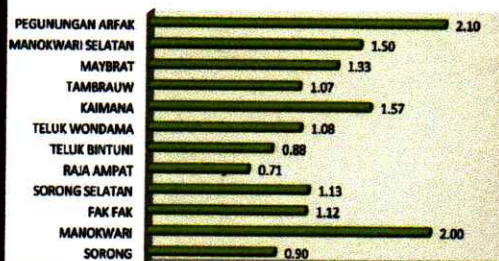
Kabupaten	Jumlah (orang)							
	PLD	%	PD-P	%	PDPT	%	PA	%
Sorong	62	13.48	27	11.39	11	12.36	6	8.82
Manokwari	38	8.26	18	7.59	8	8.99	6	8.82
Fak Fak	38	8.26	19	8.02	7	7.87	6	8.82
Sorong Selatan	36	7.83	17	7.17	10	11.24	5	7.35
Raja Ampat	31	6.74	17	7.17	4	4.49	5	7.35
Teluk Bintuni	25	5.43	21	8.86	7	7.87	5	7.35
Teluk Wondama	8	1.74	14	5.91	7	7.87	5	7.35
Kaimana	23	5.00	11	4.64	5	5.62	6	8.82
Tambrau	65	14.13	31	13.08	8	8.99	6	8.82
Maybrat	69	15.00	32	13.50	11	12.36	6	8.82
Manokwari Selatan	16	3.48	9	3.80	4	4.49	6	8.82
Pegunungan Arfak	49	10.65	21	8.86	7	7.87	6	8.82
Total	460	100	237	100	89	100	68	100

Jumlah Kampung/ PLD



Kabupaten Maybrat merupakan daerah yang memiliki jumlah PLD terbanyak (69 orang) atau mencapai 15% dari total jumlah PLD di seluruh Papua Barat. Jumlah ini tergolong banyak jika mengacu pada jumlah kampung yang harus didampingi di Kabupaten Maybrat yang berjumlah 152 kampung. Sementara itu jumlah PLD paling sedikit adalah Kabupaten Teluk Wondama yakni sebanyak 8 orang yang harus mendampingi 76 kampung. Jika diukur dengan jumlah kampung yang didampingi, maka PLD di Kabupaten Teluk Wondama merupakan pendamping yang paling berat bebannya karena setiap PLD harus mendampingi sekitar 9 kampung.

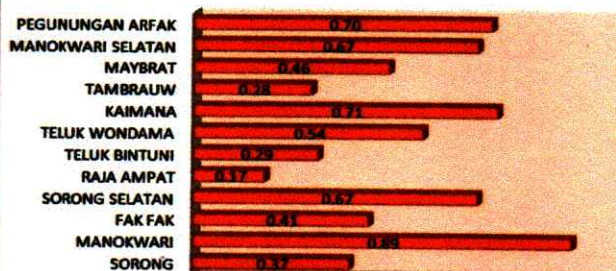
Rasio Jumlah PD-P/ Distrik



Sementara untuk tenaga pendamping di level distrik (PD-P), Kabupaten Maybrat menjadi daerah yang memiliki jumlah PD-P terbanyak yakni 32 orang. Selanjutnya Kabupaten Manokwari Selatan menjadi daerah yang memiliki jumlah PD-P paling sedikit yakni 9 orang pendamping. Jika jumlah PD-P setiap kabupaten dibagi sebarannya berdasarkan jumlah distrik, maka Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi daerah dengan sebaran PD-P terbanyak yakni lebih dari 2 orang per distrik. Adapun Kabupaten Raja Ampat menjadi daerah yang sebaran PD-P nya paling rendah dimana ada beberapa distrik yang hanya ditangani oleh seorang PD-P.

Selanjutnya untuk tenaga PDTI, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong menjadi daerah dengan jumlah PDTI terbanyak (11 orang). Sementara Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari Selatan menjadi daerah dengan jumlah PDTI paling sedikit (4 orang). Jumlah PDTI jika dibandingkan dengan jumlah distrik, maka Kabupaten Tambrauw menjadi daerah dengan sebaran PDTI paling kecil dimana 8 orang PDTI harus mendampingi 29 distrik yang ada. Artinya setiap PDTI di Kabupaten Tambrauw setidaknya mendampingi lebih dari 3 distrik.

Rasio Sebaran PDTI/ Distrik



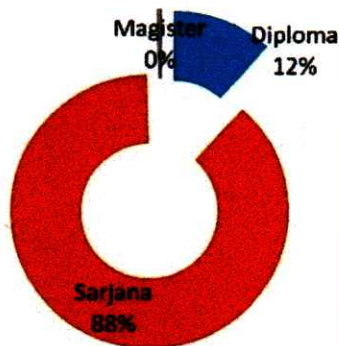
Catatan khusus bagi PDTI, tingkat removal (putus kontrak) di Papua Barat sangat tinggi, dimana setiap tahun dibutuhkan rekrutan baru dalam jumlah besar untuk mengisi pos-pos PDTI yang kosong akibat putus kontrak. Umumnya tenaga PDTI putus kontrak karena beban kerja yang terlampaui berat dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas dan butuh biaya sangat besar untuk operasional. Selain itu, minimnya pengalaman dan rendahnya jam terbang dalam bidang infrastruktur menjadi persoalan tersendiri keberadaan PDTI di Papua Barat.



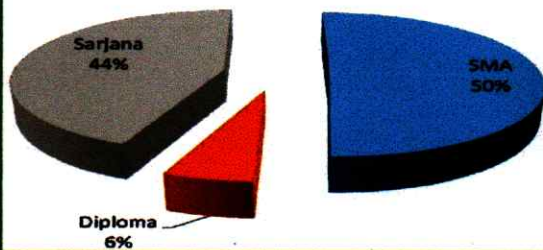
Jumlah Tenaga Ahli (TA) untuk setiap kabupaten di Provinsi Papua Barat relatif sama, antara 5-6 orang per kabupaten yang memiliki kompetensi masing-masing di bidangnya. Sebarannya tidak mempertimbangkan jumlah distrik maupun kampung, namun lebih kepada kebutuhan bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten. Namun idealnya, di setiap kabupaten terdapat semua kualifikasi TA agar memenuhi semua kebutuhan pendampingan di lapangan.

Tingkat Pendidikan Pendamping

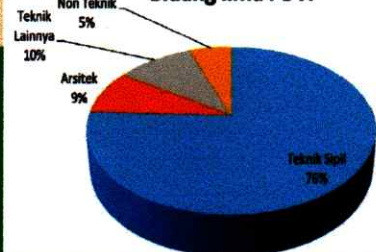
Pendidikan PD-P



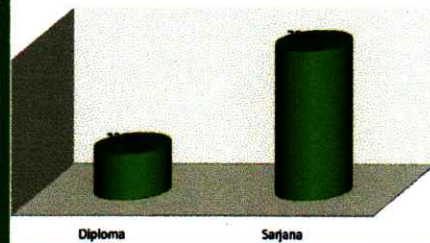
Pendidikan PLD



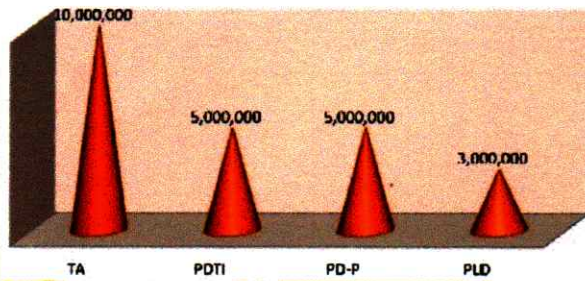
Bidang Ilmu PDTI



Pendidikan PDTI

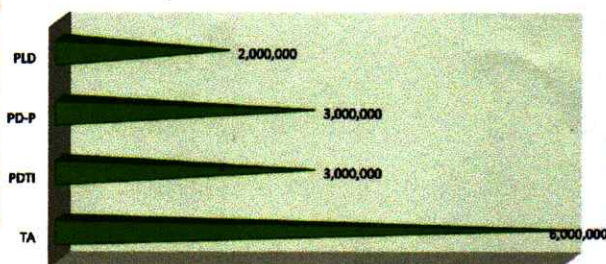


Honor Pendamping



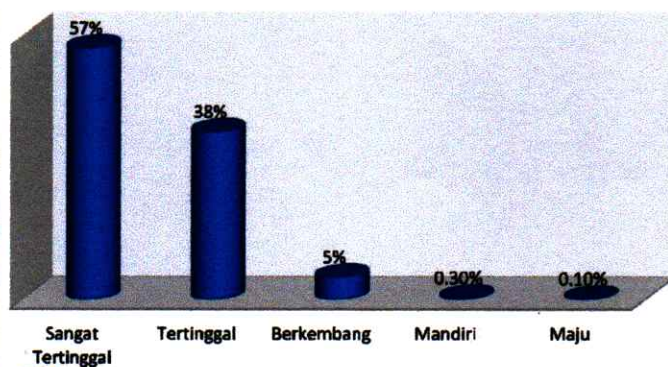
Besaran honor yang diterima para pendamping berjenjang dari PLD yang paling rendah hingga TA yang paling tinggi. Besaran ini mengikuti beban kerja dan tanggungjawab yang diemban, dimana TA bertanggungjawab penuh untuk bidang tertentu pada satu kabupaten, sementara PDTI dan PD-P di level distrik. Adapun PLD hanya bertanggungjawab di level kampung (beberapa kampung).

Operasional Pendamping



Besaran operasional yang diterima pendamping juga mempertimbangkan wilayah kerja, dimana TA yang bertanggungjawab di level kabupaten mendapatkan porsi biaya operasional terbesar. Sementara PD-P dan PDTI relatif sama. Kemudian PLD menerima biaya operasional paling sedikit karena daerah kerjanya yang relatif lebih kecil di level kampung (beberapa kampung).

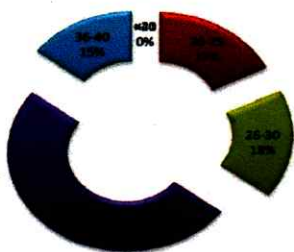
IDM Papua Barat



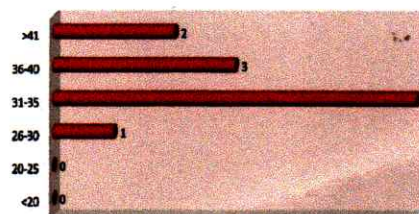
Fakta IDM Papua Barat menjadi catatan bagi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terkhusus para pendampingnya. Karena di saat bersamaan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan besaran Dana Desa, ternyata belum diiringi dengan tumbuhnya kampung-kampung dengan kualifikasi berkembang, mandiri dan maju.

Profil Responden

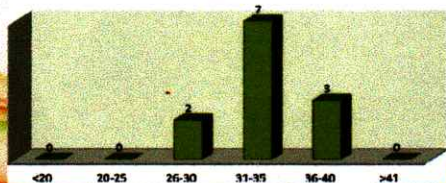
Usia PLD



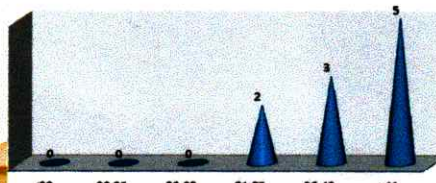
Usia PD-P



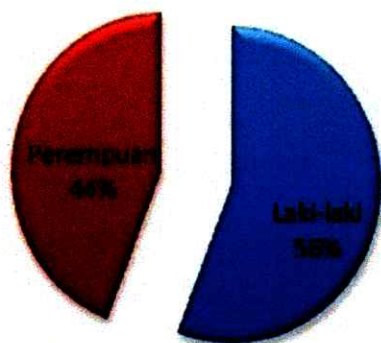
Usia PDTI



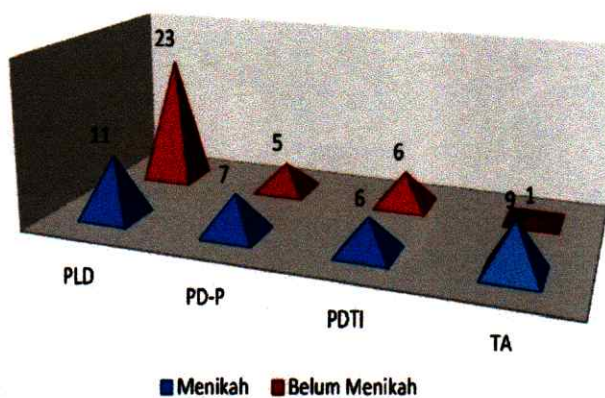
Usia TA



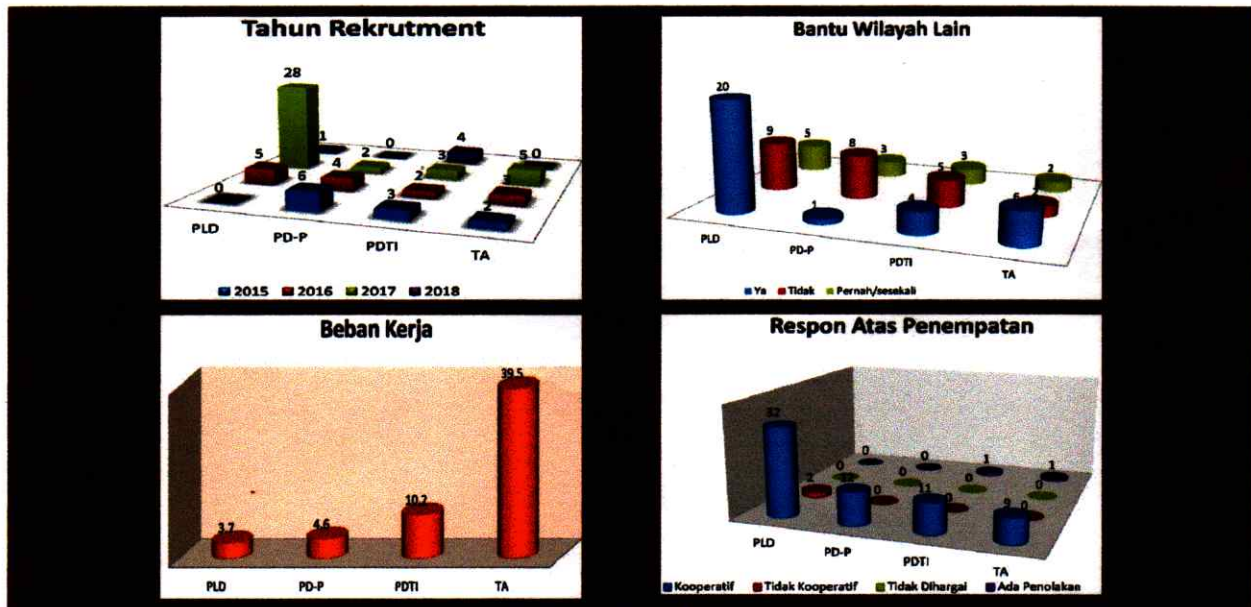
Sebaran Jenis Kelamin



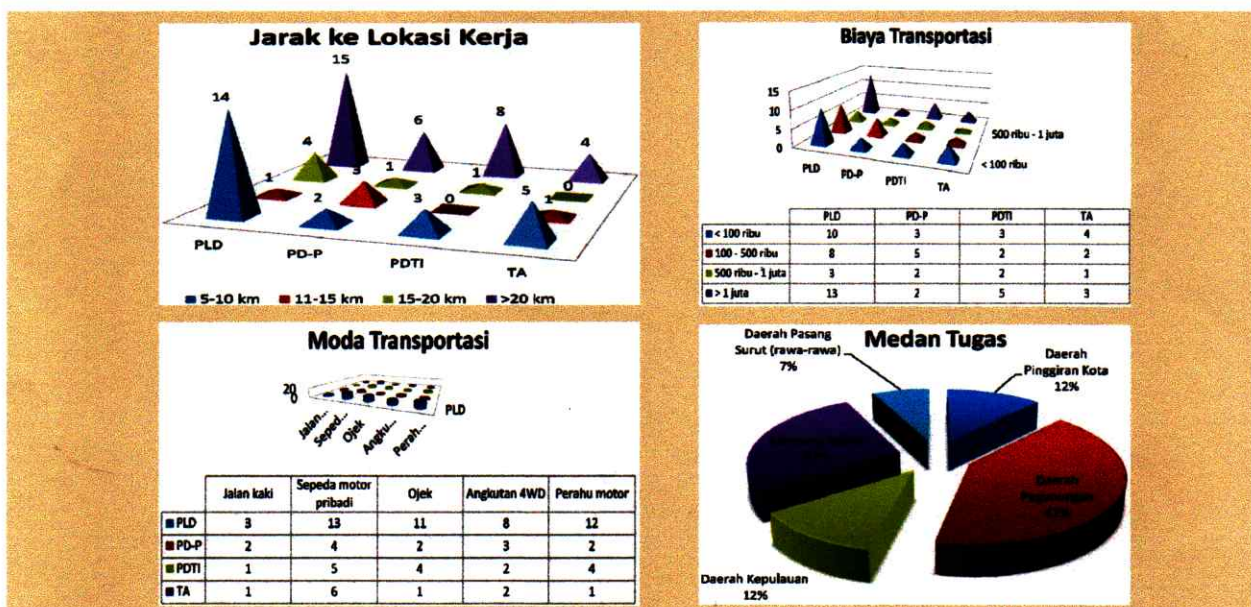
Status Pernikahan



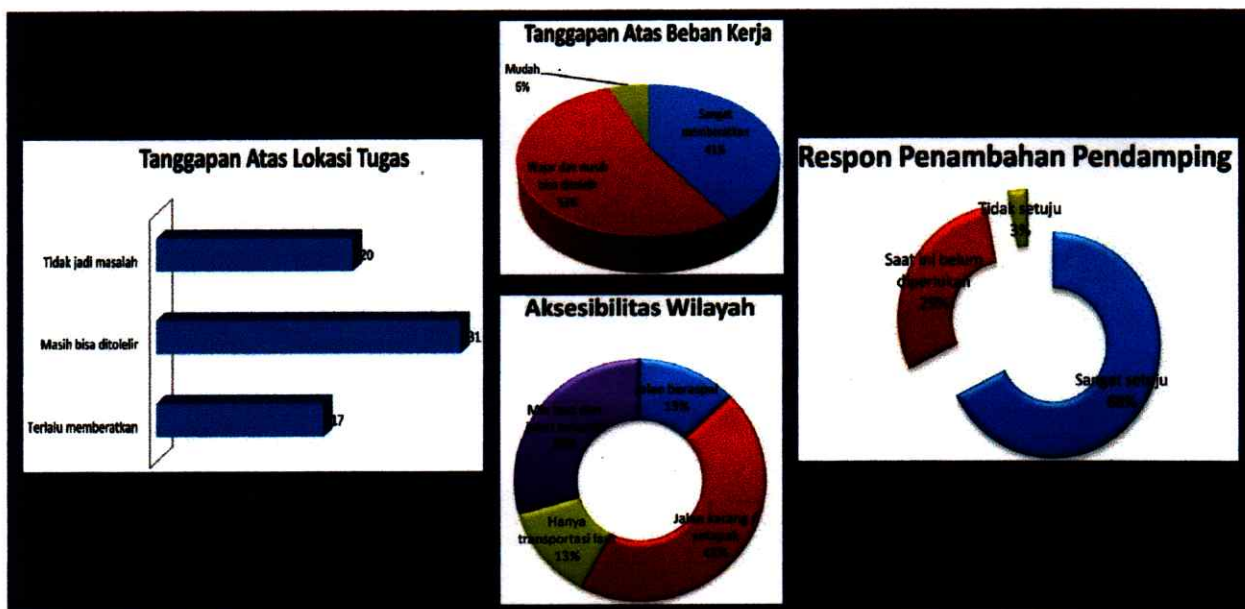
Persepsi Atas Jumlah



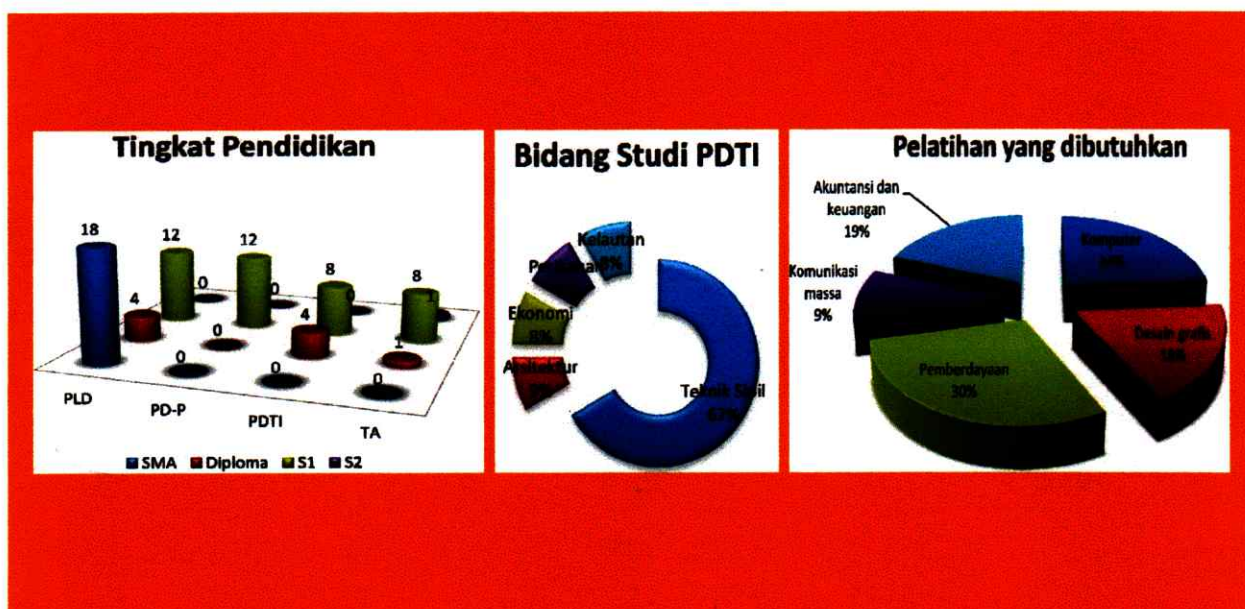
Persepsi Atas Penyebaran



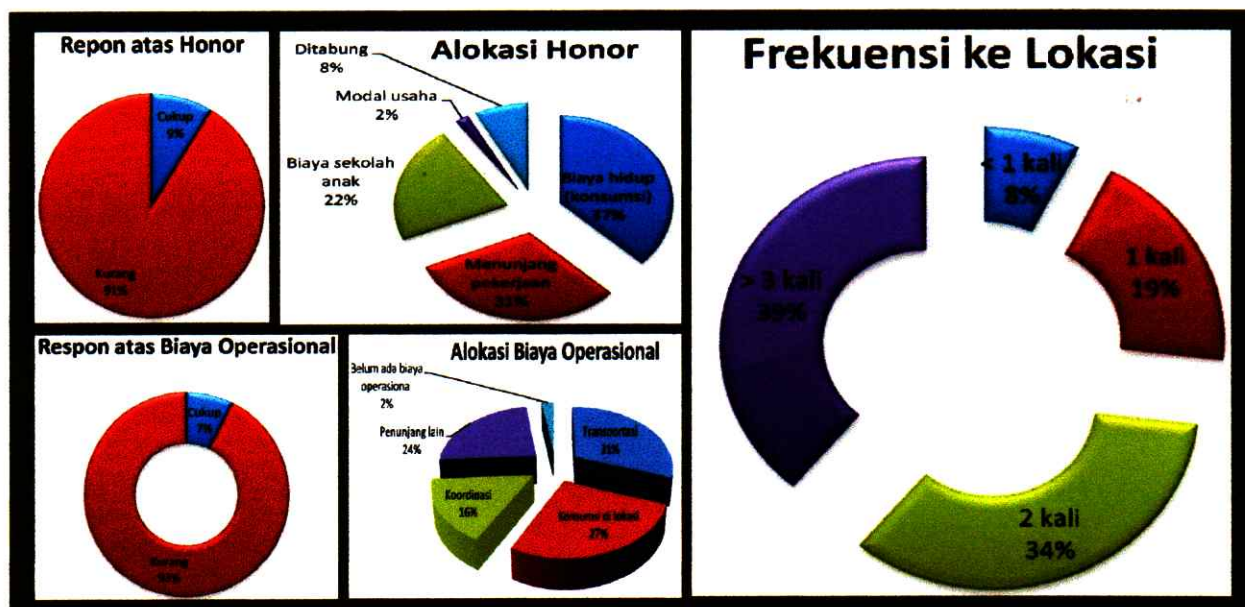
Persepsi Atas Penyebaran



Persepsi Atas Kualifikasi



Persepsi Atas Honor & Operasional



Penutup

Kesimpulan

- Jumlah tenaga pendamping profesional di Papua Barat faktanya masih kurang khususnya untuk kelompok PLD, dan PDTI.
- Sebaran tenaga pendamping profesional di Papua Barat cukup merata dari sisi jumlah menyesuaikan jumlah kampung dan distrik setiap kabupaten. Namun jumlah ini tidak selalu linear dengan kebutuhan.
- Kualifikasi tenaga pendamping profesional di Papua Barat umumnya mengikuti standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah kecuali untuk PDTI.
- Besaran honorarium dan biaya operasional yang diterima oleh para pendamping (kecuali TA) dirasa sangat kurang

Rekomendasi

- Jumlah pendamping profesional khususnya PLD dan PDTI harus ditambah.
- Sebaran pendamping profesional harus mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah.
- Kualifikasi pendamping harus ditingkatkan dengan pelatihan dan penyegaran secara berkala.
- Besaran honorarium dan biaya operasional tenaga pendamping harus ditingkatkan

Dokumentasi FGD



Dokumentasi FGD





[Handwritten signature]
1